Dra. Ek. S.K. TRIMURTI

Hubungan pergerakan BURUH INDONESIA dengan pergerakan KEMERDEKAAN NASIONAL



YAYASAN idayu

Yayasan Idayu — Jakarta 1975.
Gedung Kebangkitan Nasional
Jl. Dr. Abdulrahman Saleh 26.
Jakarta — Pusat.

Idayu Press

REZA MAULANA H
SURABAYA 6102019

DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar . . . . . 4.

Latar belakang penggerak perjuangan buruh . . . . . 5.

Perjuangan buruh sebelum Indonesia Merdeka . . . . . 6.

1. Keadaan sebelum tahun 1908 . . . . . 6.
2. Keadaan antara tahun 1908 sampai dengan tahun 1918 . 7.
3. Keadaan antara tahun 1918 sampai dengan tahun 1945 . 8.

Perjuangan buruh sesudah Indonesia Merdeka . . . . . 13.

1. Keadaan antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 . . . 13.
2. Keadaan antara tahun 1950 sampai dengan 1959 . . 19.
3. Keadaan tahun 1959 sampai dengan 1969 . . . . . 25.

Riwayat hidup singkat . . . . . 27.

PENGANTAR KATA KEPADA PARA PENGUNJUNG CERAMAH

"Yayasan Idayu" bekerja sama dengan "Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta" dan "Museum Kebangkitan Nasional" minta kepada saya untuk mengadakan ceramah hari ini, dengan judul:

"Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan
Pergerakan Kemerdekaan Nasional."

Permintaan ini saya terima. Oleh karena itulah hari ini saya mengadakan ceramah. Saya berpikir, bahwa ceramah-ceramah yang diadakan di gedung ini, semuanya akan diarahkan kepada memperlengkap penulisan sejarah.

Oleh karena itu, saya akan minta kesudian para pengunjung untuk mendengarkan ceramah saya secara teliti, dan kemudian setelah ceramah saya selesai, mengadakan kritik-kritik dan perbaikan-perbaikan mengenai catatan-catatan yang telah saya ajukan dalam ceramah ini, agar dapat saya perbaiki. Mudah-mudahan, dengan bahan-bahan yang lebih lengkap atas bantuan para pengunjung, saya akan dapat menyusun tulisan mengenai judul seperti tersebut di atas yang bisa dipertanggung jawabkan.

Apa-apa yang saya ajukan atau uraikan dalam ceramah saya, adalah hasil-hasil pengalaman saya di jaman penjajahan, hasil-hasil buku-buku yang bisa saya baca, dan hasil-hasil catatan-catatan dari koran-koran yang sempat saya baca. Saya berpendapat, bahwa ceramah saya ini baru merupakan coretan-coretan ingatan saja. Untuk membetulkan dan melengkapi coretan-coretan saya itu, saya mengharapkan bantuan saudara-saudara pengunjung disini dan pembaca naskah ini. Saya harapkan, perbaikan atau koreksi itu bisa ditulis dan diberikan kepada saya pada hari ini, atau hari sesudahnya, kepada alamat saya di rumah: Jl. Kramat Lontar H. 7 Jakarta Pusat, telepon no. 44332.

Atas perhatian dan kesudian saudara-saudara dengan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Hormat dan salam saya,

(S.K. Trimurti)

I. LATAR – BELAKANG PENGGERAK PERJUANGAN BURUH

Daya penggerak perjuangan buruh Indonesia lain dengan perjuangan buruh Eropa pada waktu abad 20 permulaan. Di Eropa, negara-negaranya sudah merdeka, waktu itu revolusi industri yang dimulai di Inggris sudah berkembang pesat. Perkembangan industri dalam sistim ekonomi kapitalis di waktu itu, makin lama makin merenggut nasib sebahagian besar pekerja-pekerja Eropa, sehingga lama-lama mereka hanya punya modal tenaga dan otak saja, yang di-"jual" kepada golongan pemilik modal. Produksi dan alat-alat produksi, semuanya menjadi kepunyaan kaum kapitalis. – Golongan yang sudah tidak punya apa-apa lagi, termasuk alat-alat produksi, inilah yang dinamakan golongan proletar. Perjuangan kelas, antara golongan proletar dan golongan kapitalis, nampak jelas di Eropa.

Sebaliknya di Indonesia, keadaannya masih tetap agraris. Kalau ada usaha-usaha lain di luar bidang agraris, jumlahnya tidak berarti. Kaum pekerja di sini masih memiliki alat-alat produksi, misalnya cangkul,ani-ani, gerobak, dan lain-lain. Rakyat Indonesia sebagian besar menjadi miskin, karena perbuatan penjajah. Golongan besar yang miskin ini, oleh bung Karno, dinamakan Kaum Marhaen. Sedang oleh bung Tan Malaka, dinamakan Kaum Murba. – Inilah sebabnya maka daya penggerak perjuangan buruh di Indonesia, bukan perjuangan proletariat, akan tetapi perjuangan rakyat miskin Indonesia pada umumnya, yang mempunyai keyakinan, bahwa satu-satunya penghalang untuk mencapai nasib baik ialah adanya penjajahan. Oleh karena itu, mereka dijiwai oleh jiwa perjuangan kemerdekaan. Dan dalam sejarahnya, perjuangan buruh selalu berdampingan dengan perjuangan kemerdekaan nasional.

II. PERJUANGAN BURUH SEBELUM INDONESIA MERDEKA

1. Keadaan sebelum tahun 1908.

Dari abad 16 sampai dengan 20 selama dijajah, Indonesia dikuasai oleh pedagang-pedagang Belanda V.O.C., – sudah itu Bataafsche Republiek, lalu Pemerintah Hindia Belanda. Disela sebentar oleh kekuasaan Inggris. Kemudian kembali kepada Belanda, sampai dengan tahun 1942. Dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 diduduki oleh Kekuasaan Militer Jepang.

Pada mula-mulanya, Belanda sendiri yang memegang monopoli atas pengedukan kekayaan di Indonesia. Setelah merasa bahwa jaminan keamanan untuk industrinya sendiri kuat, serta pasaran di Indonesia untuk menjual hasil industrinya aman, maka pada *tahun 1905 Belanda membuka pintu* untuk modal-modal Internasional (asal tidak menyaingi modal Belanda). Inilah yang dinamakan *Opendeur Politiek.* Oleh karena makin ramainya perdagangan dan kegiatan ekonomi di Indonesia, maka makin terasa kebutuhan Belanda dan kaum modal asing akan pegawai dari bangsa Bumiputera yang terdidik, yang gajinya akan lebih rendah dari pegawai bangsa Eropa.

Kebetulan timbul politik lunak dari Pemerintah Belanda yang dinamakan *"Ethische Politiek"*, – yang pokoknya Belanda merasa berhutang budi kepada bangsa Indonesia. Hutang Budi itu harus dibalas. Maka di Indonesia didirikan sekolah-sekolah yang mula-mula bernama *Klerken School* yang khusus disediakan untuk calon-calon pegawai Belanda dan kaum modal asing. – Meskipun maksud Belanda hanya akan mencukupi kebutuhan pegawai Bumiputera yang terdidik, akan tetapi ini bagi bangsa Indonesia ada baiknya.

Dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda ini, maka muncullah putra-putra Indonesia yang sadar akan nasib bangsa dan tanah airnya, yang dihisap oleh penjajah asing. Mereka tergerak hatinya untuk berjuang memperbaiki nasib bangsanya, mencapai kedudukan yang wajar sebagai bangsa yang berdaulat atas dirinya sendiri. Maka timbullah *perintis-perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia.* Mereka ini sebahagian besar terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia dan mahasiswa-mahasiswanya.

Kebangkitan bangsa Indonesia itu juga terpengaruh oleh kebangkitan bangsa Asia lainnya, terutama setelah kemenangan Jepang atas Kerajaan Rusia, pada tahun 1905. Sebelum itu, banyak orang mengira, bahwa bangsa Asia tidak mungkin mengalahkan bangsa Eropa/Barat.

Kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia mempengaruhi kepada kebangkitan perjuangan kaum buruh. Yang mula-mula tergerak adalah pegawai-pegawai yang terdidik.

Di Indonesia yang mula-mula berdiri lebih dahulu ialah organisasi dari kaum pengusaha/majikan. Pada tahun 1879 berdiri Perkumpulan Pemilik Perkebunan Deli (Deli Planters Vereniging). Tahun 1910 berdiri Perkumpulan Pemilik Perusahaan Karet di Sumatra Timur. Seterusnya perkumpulan-perkumpulan semacam itu berdiri.

Serikat Buruh yang pertama-tama berdiri ialah S.B. dari Perusahaan Kereta Api Negara (Staatsspoor) pada tahun 1905. Tapi tidak lama kemudian dibubarkan, dan anggota-anggotanya masuk ke dalam V.S.T.P. (Vereniging van Spoor en Tram Personeel) di bawah pimpinan Sneevliet dan Semaun pada tahun 1908, yang didirikan di Semarang.

2. Keadaan antara tahun 1908 sampai dengan tahun 1918.

Perjuangan rakyat Indonesia makin lama makin matang. Bentuk organisasinya mulai teratur. Misalnya: Boedi Oetomo (B.O.) yang berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Sarekat Islam (yang didahului oleh Sarekat Dagang Islam tahun 1906), Indische Partij (yang tidak membedakan asal keturunan, pokoknya warga negara Indonesia), S.D.A.P. (Sosiaal Democratische Arbeiders Partij), kemudian I.S.D.V. (Indische Sociaal Democratische Vereniging) yang kemudian menjadi P.K.I. pada tahun 1920.

Perkembangan perjuangan buruh di Indonesia berjalan sejajar dengan perkembangan pergerakan kebangsaan/perjuangan politik. Bahkan organisasi-organisasi politik itu besar pengaruhnya terhadap organisasi-organisasi buruh.

Tidak antara lama setelah berdirinya V.S.T.P. muncullah Serikat-serikat Buruh yang lain. Tahun 1911 berdiri P.B.P. (Perhimpunan Bumi Putera Pabean). Tahun 1912 berdiri P.G.H.B. (Persatuan Guru Hindia Belanda) yang kemudian namanya diganti dengan P.G.I. (Perhimpunan Guru Indonesia). Pada tahun 1914 berdiri P.P.P.B. (Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putera). Tahun 1917 di Yogyakarta oleh R.M. Surjopranoto didirikan P.F.B. (Personeel Fabrieks Bond). Tahun 1918 muncul V.v.L.

(Verbond van Landsdienaren) yang anggotanya terdiri dari beberapa Perkumpulan Pegawai.

Diantara S.B.-S.B. yang berdiri pada masa itu, ada S.B. yang anggotanya sebahagian besar terdiri dari bangsa Belanda, misalnya: Bond van Ge-employeerden bij de Suiker-industrie in Nederlandsch Indie, atau disingkat: Suikerbond.

Suasana menghadapi timbulnya Perang Dunia ke I (1914 sampai dengan 1918) dan suasana selama perang, membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pergerakan di Indonesia. Perang Dunia ke I telah membawa pergeseran peta politik di hampir seluruh dunia.

Waktu itu Negara Belanda bersikap netral, tidak memihak sana-sini. Akan tetapi hubungannya dengan Indonesia (Hindia Belanda) menjadi terhalang, karena jaraknya yang jauh. Oleh karena itu terpaksa diadakan perubahan-perubahan sikap. Oleh karena hubungan yang terputus itu, maka Hindia Belanda, dalam banyak hal harus mengambil putusan sendiri, mengenai soal-soal dalam negeri. Biasanya segala sesuatu diputuskan oleh Parlemen Belanda.

Sementara hubungan dengan Belanda putus, maka Hindia Belanda berorientasi kepada negara-negara lainnya, terutama negara-negara di Asia, untuk kepentingan export-importnya. Akibat dari peperangan itu, maka timbul pengangguran yang tidak bisa ditampung oleh industri dalam negeri sendiri.

Maka timbullah pergolakan-pergolakan. Di Negeri Belanda dan Eropa juga timbul pergolakan-pergolakan. Untuk meredakan pergolakan dan tuntutan rakyat Indonesia maka Belanda, dengan perantaraan Gubernur Jendral (van Limburg Stirum) menjanjikan kepada Indonesia, suatu Pemerintahan yang berdiri sendiri (Zelf-bestuur). Ini untuk memikat bangsa Indonesia supaya tetap setia kepada Belanda. Tapi janji ini tidak pernah ditepati. Rakyat Indonesia bukan dikasih Parlemen, tetapi hanya Volksraad saja. Inipun atas tuntutan rakyat Indonesia.

Meningkatnya perjuangan kemerdekaan nasional dan adanya pengangguran dan kesukaran hidup, telah meningkatkan juga pergerakan buruh. Vakcentral-vakcentral untuk menggabungkan SB-SB sejenis, timbul. Kemudian timbul gagasan untuk membikin gabungan-gabungan dari beberapa Vakcentral, atau Induk Organisasi Buruh.

3. Keadaan antara tahun 1918 sampai dengan tahun 1945.

Perang Dunia ke I sudah selesai. Janji-janji Belanda tidak pernah

dipenuhi. Sementara itu perjuangan rakyat Indonesia makin menjurus ke kiri dan sebagian makin mendekati/di bawah pengaruh pihak-pihak komunis. Organisasi-organisasi ada yang diinfiltrasi ke dalamnya, sehingga pecah. Misalnya saja, Serikat Islam. Ini pecah menjadi 2, yang satu tetap Serikat Islam, sedang lainnya menjadi Serikat Rakyat, sebagai onderbouw dari P.K.I.

Pemogokan umum dilancarkan di mana-mana, terutama oleh buruh kereta api. Kini timbul dua sikap di kalangan kaum pergerakan. Yang satu mau bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda, disebut golongan co atau cooperator, sedang lainnya tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda, disebut non atau non-cooperator. Mereka ini tidak mau menjadi anggota Volksraad, Gemeente-raad dan lain-lain.

Suasana makin hangat. Dan akhirnya, pada tahun 1926 timbullah pemberontakan umum yang dilancarkan oleh P.K.I. Pemberontakan ini berhasil ditindas oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Organisasi-organisasi buruh dalam prakteknya masih banyak yang membeda-bedakan kebangsaan anggotanya. Ada organisasi buruh yang anggotanya terdiri dari bangsa Belanda saja, ada yang Indo-Belanda, ada yang Tionghwa saja, dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena kedudukan ekonomi dan nasib sebagai buruh menurut hukum dibeda-bedakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Golongan Eropa kedudukannya paling tinggi, golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) lebih rendah, yang dibagi menjadi golongan: Cina dan bukan Cina, golongan Pribumi (Inlanders) yang kedudukannya paling rendah.

Di kalangan organisasi-organisasi buruh bangsa Indonesia hasrat untuk membikin vakcentral-vakcentral dan hasrat untuk menggabungkan vakcentral-vakcentral juga makin kentara. Pada akhir tahun 1919 dan permulaan tahun 1920 berdirilah P.P.K.B. (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh). Sebagai pengurusnya: Ketua: Semaun dari VSTP, Wakil Ketua: Surjopranoto dari P.F.B., Penulis: Agus Salim, Pembantu: Alimin. Program perjuangannya mengenai perbaikan nasib buruh, seperti: upah minimum, jam kerja 8 jam sehari, waktu siang, dan 6 jam sehari waktu malam, hak libur tahunan 14 hari, pengakuan terhadap organisasi buruh sebagai wakil buruh di tempat pekerjaan, menuntut supaya ada *Majelis Urusan Perselisihan Perburuhan,* di mana buruh dan majikan punya wakil, – menuntut hak pensiun, jaminan sosial, dan lain-lain. Lain dari itu, P.P.K.B. juga berjuang di bidang politik, antaranya menuntut supaya di Indonesia diadakan *Majelis Rakyat* (Parlemen) yang anggotanya dipilih oleh rakyat sendiri, –

menuntut diakuinya kebebasan hak bersuara dan berpikir, dan selanjutnya menuntut supaya bank-bank, transpor, pabrik, dikuasai oleh Negara.

Persatuan dalam P.P.K.B. itu ternyata tidak bisa bertahan lama, karena pengaruh-pengaruh dari luar negeri juga makin banyak, dan sementara itu, perpecahan dalam negeri sendiri makin menghebat, terutama antara aliran kiri dan kanan. Akhirnya perpecahan itu meletus pada tahun 1921 dalam P.P.K.B. Semaun dan kawan-kawan yang berhaluan kiri keluar dari P.P.K.B. dan mendirikan sendiri Federasi baru, bernama: *Revolutionaire Vakcentrale,* dipimpin oleh Semaun, Bergsma dan Tan Malaka. Kedudukannya di Semarang. Waktu itu anggotanya ada 14 organisasi buruh.

Malaise yang ditimbulkan oleh Perang Dunia ke I merajalela di mana-mana. Kaum buruh mempergunakan senjata terakhir untuk memperbaiki nasibnya, dengan melancarkan pemogokan di mana-mana. Tahun 1920 P.F.B. mengadakan pemogokan, sudah itu disusul oleh lain-lainnya, misalnya kaum buruh pelabuhan, dok, alat-alat transport dan sebagainya.

Terhadap pemogokan itu, pihak majikan, bukannya menuruti tuntutan buruh, melainkan memecat buruh-buruh yang mogok. Dengan begini, maka jumlah pengangguran bertambah. Ketegangan masyarakat makin menjadi-jadi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan mogok dengan undang-undang yang terkenal: artikel 161 bis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (10 Mei 1923). Karena aksi-aksi mogok itu, maka pemimpin-pemimpin buruh yang dianggap berhaluan kiri, ditangkapi, antara lain: Bergsma dan Tan Malaka,. Dengan begini, maka Revolutionaire Vakcentrale menjadi lemah. Kaum buruh sendiri akhirnya sadar, bahwa P.P.K.B. dan Revolutionaire Vakcentrale harus bersatu kembali. Maka pada tanggal 23 September 1922 berhasil diadakan fusi antara P.P.K.B. dengan R.V. menjadi federasi baru, bernama: *Persatuan Vakbond Hindia* (P.V.H.). P.V.H. ini hanya bisa tahan hidup sampai tahun 1926 saja sampai meletusnya pemberontakan PKI.

Pada tahun 1922 krisis menghebat. Semaun ditangkap dan dibuang. Mula-mula ke Kupang, kemudian ke luar negeri. Setelah Semaun tidak ada, maka VSTP mundur. Pada tahun 1927 VSTP dilebur dan didirikan *P.B.S.T.* (Persatuan Buruh Spoor dan Tram).

Sebelum dan sesudah pemberontakan P.K.I., dirasa adanya kebutuhan untuk mendirikan Vakcentral yang bebas dari pengaruh politik atau setidak-tidaknya suatu vakcentral yang tidak dipengaruhi oleh komunis. Maka pada tahun 1928 di Surabaya didirikan Vakcentral baru, bernama:

Serikat Kaum Buruh Indonesia, dibawah pimpinan Sunarjo dan Marsudi. Tanggal 1 April Serikat Buruh itu menjadi anggota dari *League Against Imperialism and for National Freedom* di Berlin. Tidak antara lama Marsudi dan kawan-kawan dibuang ke Digul karena Liga ini berbau komunis. Mr. Iwa Kusumasumantri berusaha mendirikan cabang SKBI di Sumatra Timur. Tahun 1929 Mr. Iwa dibuang ke Banda Neira dan tahun 1930 S.K.B.I. dibubarkan.

Pada tahun 1930 berdirilah Vakcentral Pegawai Negeri bernama *P.V.P.N.* (Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri) dibawah pimpinan R.P. Suroso. Tahun 1932 atas prakarsa Dr. Sutomo didirikan P.S.S.I. (Persatuan Serikat Sekerja Indonesia) dibawah pimpinan Mr. Suwono dan Roeslan Wongsokusumo.

Pada tahun 1933 meletuslah pemberontakan dari kaum buruh kapal "Zeven Provincien" yaitu suatu kapal perang Belanda yang waktu itu ada di Indonesia.

Pada tanggal 24 November 1937 dibentuk suatu *Badan untuk Penyelesaian Perselisihan antara Majikan dan Buruh,* yang terdiri dari wakil-wakil majikan, wakil-wakil buruh, dan wakil-wakil Pemerintah. (Sebelumnya jika ada perselisihan antara buruh dan majikan, yang memutuskan hakim). Tapi Badan ini hanya berlaku untuk Jawatan Kereta Api saja. Tanggal 20 Juli 1939 baru dibentuk satu *Komisi* terdiri dari pegawai-pegawai negeri, untuk mengurus perselisihan antara buruh dan majikan, di perusahaan-perusahaan partikelir. Ternyata meskipun lambat, ada kemajuan juga, ialah pada tanggal 16 Desember 1940 diadakan *Undang-undang* tentang *Penyelesaian Pertikaian Perburuhan* di perusahaan-perusahaan vital, yang punya buruh ± 20 orang. Jika komisi itu tidak bisa menyelesaikan/memutuskan, maka putusan akan diambil oleh Direktur Justisi.

Keadaan pergerakan buruh di Indonesia dan sikap Pemerintah Hindia Belanda, sedikit banyak juga terpengaruh oleh situasi internasional. Sejak adanya depressi besar tahun 1930-an, sampai dengan menjelangnya perang dunia ke II, suasana politik di Indonesia terasa makin hangat. Karena itulah Pemerintah Hindia Belanda sangat hati-hati dalam melakukan tindakan, jangan sampai melukai hati rakyat Indonesia, supaya rakyat suka berdiri di samping Belanda, bila ada apa-apa.

Pada tanggal 7 Oktober 1938 berdiri Partai Buruh bernama: *Indische Partij van* Werknemers. Tetapi Serikat-serikat Buruh dan Vakcentral-Vakcentral bersikap dingin terhadap berdirinya partai baru ini.

Pada tanggal 21 Mei 1939 berdiri GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang bersemboyan "Indonesia Berparlemen". Aksi-aksinya disetujui oleh P.V.P.N. Indonesia sudah lama menuntut adanya parlemen ini, akan tetapi selalu tidak dituruti oleh Pemerintah. Sekarang, dalam keadaan yang genting, aksi-aksi menuntut parlemen ini diteruskan.

P.V.P.N. mendirikan panitya untuk membantu Pegawai Partikelir dengan memberikan nasehat-nasehat, menjadi perantara dengan pihak majikan, memperjuangkan supaya Serikat Buruhnya diakui oleh Pemerintah. Terhadap usaha P.V.P.N. ini, Serikat-serikat Buruh Partikelir menyambut dengan baik. Mereka mendirikan Gabungan, yang dinamakan G A S P I (Gabungan Serikat-serikat Sekerja Partikelir Indonesia) di Semarang di mana saya ikut mendirikan. Mula-mula berdiri lokal dulu. Setelah mengadakan konferensi yang pertama di Semarang bulan Juli 1941 yang dihadliri oleh utusan dari Jakarta, maka lantas didirikan Pengurus Pusatnya, yang berkedudukan di Jakarta, dibawah pimpinan R.P. Suroso dari P.V.P.N. Konferensi Gaspi membuat sebuah resolusi kepada Pemerintah Hindia Belanda, yang isinya supaya Pemerintah memberikan kedudukan dan hak kepada Serikat Sekerja, untuk ikut serta mengatur menyiapkan penghargaan terhadap pegawai Perusahaan.

Pada tanggal 8 Desember 1941 Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan perang terhadap Jepang. Perang Dunia ke II sebetulnya telah dimulai sejak tahun 1939. Akan tetapi Indonesia belum terlibat langsung. Baru sejak tanggal 8 Desember 1941 itulah Indonesia terlibat langsung. Ketika perang sedang berkobar, banyak pemimpin-pemimpin Indonesia ditangkapi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mereka dimasukkan dalam interniran, tanpa ada urusan. Saya waktu itu pagi-pagi belum mandi, dicomot begitu saja.

Ketika Jepang dapat menguasai Indonesia dan menggeser kedudukan pemerintah Hindia Belanda, di Indonesia tidak ada hak-hak demokrasi sama sekali. Semua organisasi, termasuk organisasi buruh, dibubarkan. Yang boleh ada, hanya organisasi yang diadakan oleh Pemerintah saja. Inipun semua sifatnya kebaktian. Kebaktian (hokokai) terhadap kekuasaan Jepang supaya Jepang menang perang Asia Timur Raya, (Dai Toa). Jadi pada masa pendudukan Jepang, tidak ada Serikat Buruh.

III. PERJUANGAN BURUH SESUDAH INDONESIA MERDEKA

1. Keadaan antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian dari Pemerintah jajahan, melainkan hasil dari perjuangan Rakyat Indonesia sendiri. Untuk mengisi kemerdekaan, rakyat harus menyusun kekuatan. Disamping usaha-usaha Pemerintah, rakyat sendiri, terutama pejuang-pejuangnya mengambil bahagian penting sekali, baik dalam pertahanannya, maupun dalam bidang pengisian kemerdekaan. Sebab tidak boleh dilupakan, bahwa waktu sehabis proklamasi itu Indonesia seakan-akan dikepung oleh musuh-musuh yang menghendaki agar status jajahan masih tetap. Pengepungan ini betul-betul secara fisik, secara adu senjata. Untuk mengatasi keperluan yang mendadak ini pejuang-pejuang, terutama angkatan mudanya antaranya Pak Maruto Nitimihardjo yang ada di sini, mendirikan *"Committee van Actie"* pada tanggal 18 Agustus 1945, di (Gedung Juang Angkatan 45) Menteng Raya 31 Jakarta.

Secara kilat, program kerja disusun. Lalu disiarkan ke segenap penjuru (yang bisa dicapai, tentu saja). Menurut Surat Selebaran yang pertama, yang dinamakan *"Siaran Rakyat"* yang terdiri dari 3 (tiga) lembar stensilan, isi pokoknya demikian:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri tanggal 17 Agustus 1945, dan rakyat telah merdeka, bebas dari pemerintahan asing.
b. Semua kekuasaan harus di tangan Negara dan Bangsa Indonesia.
c. Jepang sudah kalah, dan tak ada hak untuk menjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia.
d. Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang.
e. Segala perusahaan-perusahaan (kantor-kantor, pabrik-pabrik, tambang, dan sebagainya) harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia dari tangan Jepang. (Perusahaan-perusahaan itu menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia).

"Committee van Actie" mengadakan bagian-bagian untuk memudahkan dan melancarkan tugas. Bagian-bagian itu ialah:

a. A.P.I. (Angkatan Pemuda Indonesia), untuk menggerakkan atau mengerahkan pemuda-pemuda.
b. B.A.R.A. (Barisan Rakyat Indonesia), untuk rakyat, terutama taninya.–
c. B.B.I. (Barisan Buruh Indonesia) untuk menggerakkan dan mengerahkan kaum buruh, dalam mengambil bahagian perjuangan kemerdekaan. Jadi pertama-tama sesudah proklamasi, perjuangan buruh tidak untuk kepentingan buruh sendiri, akan tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk merebut kekuasaan perusahaan-perusahaan dari tangan musuh dan menyerahkannya kepada Pemerintah R.I. – B.B.I. disusul dengan berdirinya Lasykar Buruh dan Barisan Buruh Wanita. Semuanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, pemimpin-pemimpin Sekutu sudah mulai mendarat di Indonesia. Jepang sudah mulai ditakut-takuti jangan sampai membantu kemerdekaan Indonesia. Tugas Jepang setelah kalah perang hanya mempertahankan status Indonesia semula (status Jajahan) dan kemudian menyerahkan Indonesia kepada Sekutu, sebagai barang inventaris. Dan Sekutu nanti yang akan mengembalikan Indonesia kepada Belanda, sebagai penjajahnya semula. Akan tetapi oleh karena Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya sebelum Sekutu datang, maka maksud Sekutu itu terhalang.

Waktu itu sudah mulai diadakan terror oleh pihak Belanda, yang berlindung pada Sekutu, – B.B.I. mempelopori perjuangan rakyat untuk merebut kekuasaan, terutama di perusahaan-perusahaan kepunyaan musuh. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah direbut ini, ditempel dengan tulisan: "Milik Republik Indonesia," Waktu itu, kaum buruh belum merasa perlu untuk memecah-mecahkan diri dalam Serikat-serikat Buruh. Yang perlu pada waktu itu, mempertahankan kemerdekaan bersama-sama dengan seluruh rakyat.

Akan tetapi pada tahun 1945 itu juga, akhir tahun, mulai ada keretakan-keretakan dari dalam, yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, oleh pemimpin-pemimpin politik, mengenai perjuangan. Satu bagian berpendapat bahwa selama musuh masih mengepung kita, kita jangan terpecah, melainkan bersatu, menghadapi musuh dari luar. Bagian lain berpendapat bahwa rakyat Indonesia harus mulai menunjukkan

kepada dunia, bahwa di Indonesia berlaku prinsip demokrasi, dan kemerdekaan bukan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan rakyat sendiri. Bahkan ada yang menjanjikan, bahwa di tahun 1946 akan diadakan Pemilihan Umum. Golongan ini mengemukakan alasannya, bahwa kalau tidak demikian, Indonesia dikira fascist dan kemerdekaannya adalah pemberian dari Jepang.

Karena adanya perbedaan pendapat ini, maka mulailah pejuang-pejuang Indonesia pecah. Di kalangan B.B.I. sendiri timbul pendapat, supaya B.B.I. dijadikan partai politik saja, yang akan diberi nama "Partai Buruh Indonesia". (7 November 1945). Akan tetapi sebagian tidak setuju dan tetap duduk dalam B.B.I. Jadi di tahun itu (1945) persatuan kaum buruh sudah mulai retak.

Pada tahun 1946 bulan Mei, di Madiun B.B.I. mengadakan kongres. Di sinilah B.B.I. dibubarkan dan diganti dengan GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) di bawah pimpinan Syamsu Harya Udaya. Pada tahun 1946 itu juga didirikan Partai Buruh Indonesia (P.B.I.) yang dipimpin oleh Syamsu Harya Udaya juga.

Latar belakang keadaan politik di Indonesia, perlu diungkapkan lebih dahulu, karena ini besar pengaruhnya terhadap perkembangan pergerakan buruh waktu itu.

Dalam bulan Agustus 1945 Kabinet belum dibentuk. Akan tetapi pekerjaan serta tugas-tugas sebagai Negara sudah dijalankan. Pada waktu itu kekuasaan penuh ada di tangan Bung Karno dan Bung Hatta.

Pada *tanggal 18 Agustus 1945* Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama kali sesudah proklamasi. Sidang memutuskan:

a. Menyempurnakan Undang-undang Dasar (1945) yang sebelumnya sudah direncanakan.
b. Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
c. Pekerjaan Presiden, sebelum dapat dibentuknya Parlemen, dibantu oleh *Komite Nasional.*

Kabinet pertama baru didirikan pada tanggal 4 September 1945. Bentuknya Presidentiil Kabinet. Menteri-menteri hanya sebagai pembantu Presiden saja. (Ini sesuai dengan U.U.D. 45).

Tetapi Kabinet pertama ini hanya berumur sampai bulan November 1945 saja. Sebabnya, ada penggulingan kekuasaan secara tenang-tenang. Bulan November 1945 Komite Nasional Pusat mengadakan

sidang di Jakarta. K.N.I.P. itulah yang mengambil keputusan untuk membubarkan Kabinet pertama atas idee Sutan Sjahrir. Sekarang Kabinet diganti dengan Kabinet Parlementer. Sjahrir sendiri menjadi Perdana Menteri. Putusan-putusan yang telah diambil oleh Pemerintah Sjahrir ialah:

a. Kekuasaan Presiden dikurangi, dengan memindahkan hak membuat Undang-Undang kepada Badan Pekerja K.N.I.P.
b. Menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada D.P.R. Sebelum ada D.P.R., Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Badan Pekerja KNIP.
c. Larangan untuk mendirikan partai-partai politik, dihapuskan. Jadi sekarang partai-partai politik boleh berdiri. Karena inilah maka terjadi pengelompokan-pengelompokan, yang masing-masing akan menyusun kekuatannya sendiri-sendiri.

Menghadapi serangan dan tantangan pihak Belanda dan kawan-kawannya, Pemerintah Sjahrir berdaya-upaya menempuh jalan damai. Meski demikian, Belanda dan kawan-kawannya tetap mengadakan serangan kepada pihak Republik.

Di kalangan organisasi buruh juga timbul perpecahan. *GASBI pecah.* Pimpinan GASBI sementara orang ada yang dituduh tersangkut Peristiwa 3 Juli, sebagai peristiwa yang dituduhkan terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak menyetujui politik Sjahrir, terutama dengan perjanjian Linggarjati-nya. Pada bulan Juli sebagian dari anggota GASBI mendirikan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (G.S.B.V.) di bawah pimpinan Surjono dari S.B. Minyak.

Atas usaha Alimin dan Harjono, pada tanggal 29 November 1946 terdapat kata sepakat antara GASBI dan GSBV untuk sama-sama meleburkan diri dalam satu wadah, ialah: S.O.B.S.I. (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Dengan berdirinya SOBSI sebetulnya kaum buruh telah ditarik kepada satu pendirian sikap, ialah pro-Linggarjati. SOBSI menyatakan dirinya bukan partai pilitik dan bukan bagian dari sesuatu Partai Politik. Akan tetapi SOBSI tidak bisa melepaskan dirinya dari persoalan politik. Inilah sebabnya, SOBSI sebagai gabungan, kerap kali mengambil putusan-putusan yang sifatnya politik.

Dalam kongresnya di Malang bulan Mei tahun 1947, SOBSI mengambil putusan antara lain:

a. Masuk menjadi anggota W.F.T.U. (World Federation of Trade Unions).

b. Menyetujui sikap Sentral Biro SOBSI dalam menyetujui Perjanjian Linggarjati.

c. Menerima Manifest Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945, yang menyatakan, bahwa segala hak milik bangsa asing akan dikembalikan kepada yang punya.

(Tanggal 3 November 1945 Pemerintah menjanjikan diadakannya Pemilihan Umum, dengan menganjurkan dibentuknya Partai-partai untuk membela kepentingan Negara dan Rakyat).

Dengan adanya sikap SOBSI yang menyolok itu, maka terjadilah perpecahan lagi di kalangan kaum buruh. Mereka yang tidak setuju kepada SOBSI, keluar.

Sementara itu pergeseran kekuasaan terjadi lagi. Kabinet Sjahrir diganti oleh Kabinet Amir Sjarifuddin. Baik Kabinet Sjahrir, maupun Kabinet Amir, sama-sama meneruskan politik damai, politik berunding dengan pihak Belanda. Kalau Sjahrir dikenal dengan Linggarjatinya, maka Amir dikenal dengan perjanjian Renville-nya.

Pada waktu ini terjadi hal-hal yang ganjil.

P.K.I. dengan organisasi-organisasi satelitnya yang pada mula-mula gigih menyetujui sikap berunding dengan pihak Belanda (Linggarjati dan Renville), setelah Muso (pemimpin P.K.I. yang dibuang ke luar negeri) datang ke Indonesia, dan menyatakan sikapnya anti perundingan, maka P.K.I. dan kawan-kawannya mendadak sontak berbalik, menjadi menentang setiap perundingan dengan pihak musuh. Anehnya lagi, – Alimin adalah dianggap pemimpin PKI yang pro-perundingan, sedangkan Muso yang juga dianggap pemimpin PKI, anti perundingan. Ini menimbulkan tanda-tanya yang besar di kalangan ramai. Mengapa? Ada apa di dalam P.K.I.?

Kabinet telah berganti baru, sekarang dipegang oleh Hatta. Dan Kabinet Hatta ini meneruskan perundingan-perundingan yang sudah dimulai sejak Sjahrir sampai Sjarifuddin. Tetapi, setelah Muso menyatakan anti perundingan, maka P.K.I. dan organisasi-organisasi yang menjadi pesertanya, merupakan barisan opposisi terhadap pemerintah Hatta ini. Amir Sjarifuddin, sebagai bekas Perdana Menteri yang mencetuskan perjanjian Renville, ikut serta menjadi opposisi politik Kabinet Hatta. Malahan Amir menjadi salah seorang pemimpinnya. Pertentangan politik di dalam negeri begitu hebat, sehingga mencapai klimaxnya, ketika Peristiwa Madiun pecah, tanggal 18 September 1948.

Setelah Peristiwa Madiun dapat diatasi, timbullah bencana baru. Belanda menyerang Republik Indonesia pada tanggal 18/19 Desember 1948. Peperangan terjadi. Belanda menamakan tindakannya itu hanya sebagai Aksi Polisi saja. Akhirnya terjadi lagi perundingan damai, yang *dimulai pada bulan April 1949. Selanjutnya diikuti dengan adanya Konferensi Meja Bundar* antara Indonesia dengan Belanda. Pada akhirnya, tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda terpaksa mengakui Kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam suasana politik yang demikian ini, maka pergerakan buruh terkena juga bahaya perpecahan, yang disebabkan perbedaan pendapat dan sikap politik dari Partai-partai Politik. SOBSI ternyata tidak bisa bertahan lama, karena terlalu jauh melibatkan dirinya pada persoalan-persoalan politik. Serikat-serikat Buruh yang tidak menyetujui sikap SOBSI menarik diri, di antaranya S.B. Gula, Tidak antara lama, atas prakarsa S.B. Gula, didirikan gabungan baru, yang bernama GASBRI (Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia).

Di kalangan pemimpin-pemimpin Islam, timbul pendapat untuk mendirikan organisasi buruh yang berdasarkan Islam. Meskipun buruh berjuang untuk hak-hak kebendaan, akan tetapi tindakannya ini harus dilandasi oleh kepercayaan agama, sebagai Perintah Tuhan yang akan memimpin manusia ke arah jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka pada tanggal 27 November 1948, berdirilah S.B.I.I. (Serikat Buruh Islam Indonesia) di bawah pimpinan Moh. Daljono S.H. Berdirinya SBII ini atas kesadaran golongan Islam, karena sejak berdirinya S.I. (Serikat Islam) dulu, orang-orang Islam kurang memperhatikan massa aksi di kalangan kaum buruh,

Bentuk SBII tidak seperti organisasi buruh yang sejenis, melainkan campuran, siapa saja asal merasa Islam boleh masuk SBII. Berhubung dengan itu, maka dalam tubuh SBII dibentuk Seksi-seksi, menurut jenis pekerjaan atau tempat kerja masing-masing anggota.

Sementara itu kesadaran di kalangan kaum buruh timbul lagi. Jika buruh pecah, akan merugikan kaum buruh sendiri. Maka dari itu harus selalu diusahakan supaya ada persatuan di kalangan organisasi-organisasi buruh.

Pada bulan November 1948 di bawah pimpinan Sudiro dari SSKDN (Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri) dapat didirikan ICOSS (Ikatan Central Organisasi Serikat Sekerja). Tanggal 5 Desember tahun 1948 di bawah pimpinan Mr Suripto dari SSKK (Serikat Sekerja

Kementerian Kehakiman) berdirilah P.O.B. (Persatuan Organisasi Buruh).

Antara ICOSS dan POB berniat bergabung jadi satu. Tetapi belum sampai terjadi, keburu adanya Aksi Militer Belanda yang kedua, bulan Desember, 1948.

Selama Aksi Militer Belanda, maka kaum buruh terus berjuang, berdampingan dengan pejuang-pejuang lainnya. Kaum buruh terus menyebar-luaskan pengaruhnya dan memperkuat diri untuk ikut mengambil bahagian dalam peperangan kemerdekaan.

Setelah pengakuan Kedaulatan oleh Belanda, hasil dari KMB Indonesia dibagi dua. Satu daerah yang betul-betul dikuasai Republik Indonesia atau daerah de facto R.I., dan daerah yang masih dikuasai oleh Belanda, meskipun kepala-kepala Negaranya diambilkan dari bangsa Indonesia sendiri. Waktu itu kaum buruh, bukan hanya giat berjuang di dalam daerah de facto R.I. akan tetapi juga di luar daerah itu. Sehingga usaha untuk Kesatuan R.I. seluruhnya antara lain hasil usaha dari golongan buruh disamping golongan Angkatan Bersenjata. Untuk menyelamatkan organisasi dari pihak Belanda yang masih berkuasa di daerah luar de facto, maka di sana nama-nama Serikat Buruh masih pakai nama-nama sendiri dan secara resmi belum digabungkan. Hanya pemimpin-pemimpinnya saja yang sering bertemu, untuk menyatukan sikap dan tindakan mengenai usaha kemerdekaan ini. Pokoknya, sebelum Republik Kesatuan bisa terlaksana, kontak antara organisasi buruh dari daerah de facto sampai ke daerah luar de facto selalu ada.

2. Keadaan antara tahun 1950 sampai dengan 1959.

Setelah Indonesia menjadi "aman", Indonesia dilanda oleh macam-macam pergolakan dalam negeri, seperti:

a. *GERAKAN APRA* (Angkatan Perang Ratu Adil) dipimpin oleh Westerling, yang mengadakan aksinya di Bandung tanggal 23 Januari 1950.
b. Gerakan Darul Islam (D.I.) dan Tentara Islam Indonesia.
c. *Pemberontakan Ibnu Hadjar* di Kalimantan.
d. Proklamasi *Republik Maluku Selatan* di Ambon tanggal 25 April 1950.
e. *Pemberontakan* bekas *pensiunan KNIL* di Makasar tanggal 7 Agustus 1950.

Semua kekeruhan itu harus dapat diatasi. Kekuatan nasional harus dapat disatukan. Akan tetapi dengan adanya anjuran dari Pemerintah

tentang boleh didirikannya partai-partai tanpa batas, maka kekuatan yang mestinya harus dipersatukan itu menjadi pecah. Masing-masing partai yang ada, berusaha untuk mempengaruhi Serikat Buruh. Maksudnya untuk mencari massa sebanyak mungkin dan untuk memenangkan partainya dalam Pemilihan Umum, yang akan diadakan tahun 1956.

Oleh karena itu, meskipun ada SB yang tidak mau menjadi bahagian dari Partai Politik, tetapi kenyataannya menjadi satelit partai politik tertentu, langsung atau tidak langsung. Tidak mengherankan, bahwa jika ada ketegangan antara partai-partai politik, maka tegang pulalah Serikat-serikat Buruh.

Tetapi masih ada golongan-golongan atau orang-orang yang berusaha untuk menyatukan organisasi-organisasi buruh. Sejak tanggal 30 Mei 1949 dalam pertemuan yang diadakan oleh beberapa Pengurus Besar Serikat Sekerja dan Serikat Buruh, telah dibentuk: *Panitya Koordinasi Serikat-serikat Buruh.* Panitya ini bertugas menggerakkan kembali S.B., mengusahakan adanya suatu induk organisasi untuk seluruh Indonesia, dan mengkoordinir soal-soal perburuhan. Nama Panitya kemudian diganti dengan Himpunan Serikat Serikat Buruh Indonesia (HISSBI). HISSBI menitik beratkan pekerjaannya pada usaha terbentuknya Induk Organisasi Buruh untuk seluruh Indonesia. Dan selama pengakuan terhadap R.I. belum ada, maka HISSBI mengusahakan hubungan dengan organisasi-organisasi buruh di luar daerah de facto R.I.

Sementara itu organisasi-organisasi buruh di luar daerah de facto R.I. juga berusaha untuk mendirikan Induk Organisasi Buruh. Pada Bulan Agustus 1949 di Bandung dilangsungkan Kongres oleh Gabungan Serikat Serikat Buruh dari Negara Indonesia Timur, Kalimantan, Sumatra, Serikat Buruh Vertikal dan Serikat Buruh setempat di Jawa Barat bersama dengan BPSS (Badan Pusat Serikat-serikat Sekerja), yang diketuai oleh Mr. Kusna Puradiraedja. Maksud Kongres itu ialah untuk membentuk Induk Organisasi Buruh untuk seluruh Indonesia. Akan tetapi di antara yang hadlir ada yang tidak setuju. Oleh karena induk yang demikian sudah ada di Yogyakarta (Pusat R.I. de facto). Lebih baik nanti menggabungkan diri saja. Maka oleh karena itu Kongres hanya memutuskan pembentukan: *Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia* (PSOBSI) yang bertugas untuk menyelenggarakan adanya Induk Serikat Buruh dengan meleburkan diri kepada induk yang sudah ada, atau bersama-sama mendirikan yang baru. Lain dari itu kongres juga menyusun *Piagam Buruh.*

Seterusnya antara PSOBSI dan HISSBI diadakan saling bertukar

pikiran. HISSBI berpendapat, bahwa pembentukan induk itu belum dapat, sebelum diadakan vertikalisasi lebih dahulu antara S.B.-S.B. yang ada. Sebab jalan inilah yang demokratis, ialah organisasi harus disusun dari bawah. Sedangkan PSOBSI berpendapat sebaiknya induk harus disusun dulu, sebab kepentingan buruh dalam R.I.S. (Republik Indonesia Serikat) minta penyelesaian cepat, dan usaha vertikalisasi bisa menyusul belakangan.

Putusan yang terakhir antara HISSBI dan PSOBSI pada tanggal 21 September 1949 ialah pembentukan *Komisi Kerja* untuk mengadakan persiapan seperlunya guna pembentukan Induk Organisasi Serikat Buruh.

SOBSI ketika itu belum bangun kembali. Jadi dalam daerah de facto R.I. satu-satunya induk yang ada, hanyalah HISSBI. — Tapi SOBSI segera bisa bangun kembali, riwayatnya demikian:

Pada bulan September itu SOBSI menerima undangan dari W.F.T.U. supaya mengunjungi konferensi buruh Asia–Australia di Peking. Undangan ini dirasa perlu sekali diterima, dan Indonesia merasa perlu mengirimkan utusan. Sebab dengan begitu maka perjuangan buruh dan perjuangan nasional rakyat Indonesia bisa dibawa ke forum internasional dan bisa diharapkan bantuan dunia Internasional untuk perjuangan rakyat Indonesia. — Akan tetapi oleh karena SOBSI belum bangun, maka undangan itu dipegang oleh HISSBI. Sedangkan HISSBI merasa tidak berhak.

Oleh karena itu timbul niat untuk membangun lagi SOBSI yang kuat dan bersih. Pada tanggal 9 Oktober dibentuk Komisi penyelesaian untuk memperkuat SOBSI ke dalam dan keluar. Akhir bulan Oktober, segera SOBSI mengirim delegasi ke konferensi di Peking yang diketuai oleh Nyono.

Sekarang ada *3 induk organisasi* buruh yang masing-masing saling memperkuat diri, di luar usaha HISSBI, ialah: G.S.B.I. (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) GASBRI dan SOBSI sendiri. Kedudukan HISSBI makin terdesak, karena putusan-putusan baru bisa diambil bila telah disetujui oleh salah satu anggota induk serikat buruh. Dengan demikian maka HISSBI meneruskan usahanya untuk membentuk satu Induk Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. HISSBI menyelenggarakan Konferensi tanggal 29–3–31 Juli 1950 di Jogyakarta. Hampir semua Gabungan Organisasi Buruh datang, hanya SOBSI yang tidak datang. Konferensi memutuskan:

a. Membentuk Induk Organisasi Buruh, dengan melalui *Kongres Buruh Umum.*

b. Kongres Buruh Umum akan dilangsungkan di Jakarta pada bulan November 1950.

SOBSI tidak menyetujui adanya Kongres Buruh Umum itu, karena dianggap tidak demokratis. Pada tanggal 3 Agustus SOBSI menyatakan keluar dari HISSBI.

Karena kesukaran teknis dan lain-lainnya, maka Kongres Buruh Umum yang dicita-citakan oleh HISSBI baru dapat dilaksanakan di Bandung pada tanggal 5–9 Februari 1951. SOBSI mengritik pedas adanya Kongres Buruh Umum ini.

Akhirnya Kongres hanya dapat membentuk satu *Badan Koordinasi Buruh Indonesia (BKBI).* Anggotanya terdiri dari: GSBI, BPSS, Vekcentral baru dan SBLGI. Tugas Badan itu ialah mempersiapkan dasar-dasar ke arah terlaksananya pembentukan Induk Serikat Buruh, mempersiapkan Kongres Buruh Umum, mengusahakan vertikalisasi dari organisasi-organisasi buruh yang ada dan mempersatukan organisasi vertikal itu ke dalam satu induk.

Tapi usaha-usaha itu gagal, karena pertama penolakan dari SOBSI dan kedua banyak faktor lain yang menghambat. Kongres Buruh Umum tidak dapat mencapai tujuannya, namun demikian ada hasil yang bisa dicetuskan, ialah tercapainya satu vaksentral baru yang mula-mula bernama COBRA. Pada Kongres berikutnya yang diadakan di Jakarta bulan April 1951, COBRA diganti nama menjadi SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia). Waktu itu yang bergabung di dalamnya ada 19 Serikat Buruh.

Sementara itu BPSS dan POB meleburkan diri menjadi PSBI (Pusat Serikat-Serikat Buruh Indonesia) pada tanggal 5 Juli 1952. Kemudian antara PSBI dan GSBI mengadakan *Dewan Serikat-Serikat Buruh Indonesia* (DSBI). Dewan berpendapat, bahwa masih banyak S.B.-S.B. yang non-politik dan non-partai yang bisa dikonsolidir, digabungkan, sehingga tidak menjadi tempat pertentangan politik. Mereka ini tidak mau dipengaruhi oleh Federasi Buruh Internasional, baik WFTU maupun ICFTU.

Kenyataannya dalam masyarakat Indonesia di waktu itu terdapat dua pemisahan pendapat, ialah yang pertama mau berafiliasi kepada Federasi Buruh Internasional (baik WFTU maupun ICFTU), sedangkan yang kedua tidak mau berafiliasi kepada partai-partai atau ideologi-ideologi politik dan tidak mau menjadi anggota dari Federasi Buruh Internasional.

Dalam pada itu, keadaan dalam negeri makin repot, karena timbulnya beberapa macam pemberontakan. Selain itu, sidang Konstituante yang

sedang berlangsung di Bandung tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sidang berlarut-larut tidak bisa memutuskan apa-apa yang berarti. Oleh karena itu rakyat makin gelisah, makin tidak percaya kepada Lembaga-lembaga Negara seperti Konstituante itu. Lembaga Konstituante dipergunakan untuk kepentingan golongan-golongan saja, bukan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Untuk mengatasi ini, maka Presiden mengeluarkan *Dekrit yaitu Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959,* yang menetapkan:

a. Konstituante dibubarkan.
b. Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi.
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk.

Setelah Dekrit ini dilaksanakan, maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintahan dipimpin oleh Presiden. Kabinet lama dibubarkan, lalu dibentuk *Kabinet Kerja.* (Sebelumnya kabinet-kabinet dinamakan menurut nama Perdana Menterinya). Presiden merangkap menjadi Perdana Menteri.

Kekuasaan makin lama makin mengumpul di tangan Presiden. Golongan pro-komunis makin mendapat angin baik. Sedang golongan anti-komunis makin menjauhkan diri. Ini semua menimbulkan ketegangan-ketegangan politik yang mula-mula tak dirasakan sendiri oleh Presiden.

Pada waktu kekuasaan seluruhnya hampir dipegang oleh Presiden Sukarno, maka pertumbuhan organisasi-organisasi buruh yang diasuh atau dipengaruhi oleh partai-partai politik, muncul berturut-turut. Hal ini mungkin disebabkan karena partai-partai politik lain yang non-komunis ingin membawa buruh ke dalam kancah ideologi yang lain, misalnya: nasionalisme, Agama, dan sebagainya.

Waktu itu yang paling menonjol kegiatannya ialah SOBSI. SB-SB yang berafiliasi kepada SOBSI juga ikut menonjol. Ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik makin meruncing. Masing-masing menyusun kekuatannya sendiri-sendiri. Front anti komunis yang didirikan di Indonesia kegiatannya makin bertambah. Di dalam situasi yang demikian ini, tidak mungkin untuk membikin satu Induk Organisasi Buruh untuk seluruh Indonesia.

Sampai dengan tahun 1959 berturut-turut telah berdiri induk-induk organisasi yang dikemudikan dan dibina oleh partai-partai politik atau golongan politik, seperti di bawah ini:

1. S.B.I.I. (Serikat Buruh Islam Indonesia). Nama ini kemudian diganti dengan GASBIINDO (Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia). Berdiri tanggal 27 November 1947 berafiliasi kepada KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) dan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya).
   Akan tetapi setelah GASBIINDO Mendukung berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), maka GASBIINDO dikeluarkan dari keanggotaannya di Sekber Golkar, karena Sekber Golkar hanya menerima anggota yang tidak berafiliasi kepada partai politik.
   GASBIINDO juga berafiliasi kepada ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions). Akhirnya GASBIINDO pecah menjadi 2.
   a. Federasi Buruh Islam Indonesia (FBII) di bawah pimpinan Mochtar Anwar,–
   b. Masih tetap bernama GASBIINDO di bawah pimpinan A. Sudono.
2. SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia) berdiri tanggal 9 Februari 1951. Berafiliasi kepada Partai Murba (Meskipun tidak terang-terangan), dan berafiliasi kepada Sekber Buruh dari Sekber Golkar.
3. HISSBI (Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia), berdiri tanggal 9 Oktober 1952. Berafiliasi kepada Sekber Buruh (Sekber Golkar).
4. KBKI (Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia), berdiri tanggal 10 Desember 1952. Berafiliasi kepada Sekber Buruh (Golkar). Riwayat berdirinya KBKI ialah: Buruh HIMBI dan Buruh Demokrat dalam Kongres PNI, memutuskan untuk membentuk KBKI.
   Kongres KBKI ke III di Bandung tahun 1962 pecah menjadi 2:
   a. Yang tetap bernaung pada PNI dengan merubah namanya menjadi DPP. KBKI, dibawah pimpinan Surojo S.H. Pada tahun 1963 DPP. KBKI merubah namanya menjadi DPP. KBM mengikuti Kongres PNI di Purwokerto.
   b. Yang tidak bernaung pada PNI, namanya menjadi DPS. KBKI di bawah pimpinan Ahem Erningpradja.
5. KBSI (Kongres Buruh Seluruh Indonesia), berdiri tanggal 12 Mei 1953.
6. SOB. Pancasila (Sentral Organisasi Buruh Pancasila), berdiri tanggal 19 Juni 1954. Berafiliasi kepada Sekber Buruh, B.A.T.U. (Brotherhood Asia Trade Unions). W.C.L. (World Confederation of Labour).
7. GOBSII (Gerakan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia), berdiri

tanggal 27 Maret 1953. Berafiliasi kepada PSII, KABI, Sekber Buruh, ICFTU.

8. SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslimin Indonesia), berdiri tanggal 10 September 1955. Berafiliasi kepada NU, GABI, Sekber Buruh.
9. KBIM (Kongres Buruh Islam Merdeka) berdiri tanggal 17 Januari 1957.
10. PORBISI (Persatuan Organisasi Buruh Islam Seluruh Indonesia), berdiri tanggal 18 Desember 1958. Berafiliasi kepada Partai Muslimin Indonesia dan ICFTU.

3. Keadaan tahun 1959 sampai dengan 1969.

Dalam periode ini keadaannya sangat berlawanan dengan sebelumnya. Kekuasaan hampir seluruhnya di tangan Presiden. Kegoncangan-kegoncangan yang lalu, diteruskan penumpasannya. Pada saat ini ditambah lagi beban ialah dengan adanya Aksi Ganyang Malaysia. Ketegangan politik makin menjadi-jadi. Golongan pro komunis makin mendapat angin baik, sedangkan golongan anti komunis makin memperkuat diri untuk bertahan. Majunya SOBSI makin mencurigakan golongan yang menentangnya. Inilah antara lain sebabnya, maka bermunculan Induk-Induk Organisasi Buruh baru berdiri, seperti:

1. KUBU Pancasila (Kesatuan Organisasi Buruh Pancasila) berdiri pada tanggal 7 Juli 1961. Berafiliasi kepada IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), KABI, Sekber Buruh.
2. SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia) berdiri tanggal 31 Mei 1961. Tahun 1968 nama itu diganti menjadi: Swadiri Organisasi Karya Sosialis Indonesia. Singkatannya masih sama. (19–3–1968).
3. KONGKARBU SOKSI (Konsentrasi Golongan Karyawan Buruh Soksi) berdiri tanggal 19 Desember 1962. Berafiliasi kepada KABI, Sekber Buruh. (Sekber Golkar).
4. GERBUMI (Gerakan Buruh Muslimin Indonesia) berdiri tanggal 20 September 1962. Berafiliasi kepada partai PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
5. KESPEKRI (Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia) berdiri tanggal 6 November 1963. Berafiliasi kepada KABI, Sekber Buruh. Dimasukkan Kelompok KINO–GAKARI (KINO = Kelompok Induk Organisasi, GAKARI = Gabungan Karya Rakyat Indonesia). – BATU, ICFTU, WCL (1964).

6. IKM (Ikatan Karyawan Muhammadiyah) berdiri tanggal 25 November 1965. Berafiliasi kepada Muhammadiyah, Sekber Buruh.
7. PERKABI (Persatuan Karyawan dan Buruh Indonesia) berdiri tanggal 11 Maret 1966. Berafiliasi kepada KOSGORO.
8. KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis) berdiri tanggal 1 Januari 1964. Berafiliasi kepada PNI/Front Marhaenis. (lihat no. 4 KBKI pada halaman 24).
9. Federasi Buruh Transport Indonesia, berdiri tanggal 24 Oktober 1969, terdiri dari 7 organisasi buruh transport.

Pada tanggal 30 September 1965 pecahlah apa yang dinamakan "Gerakan 30 September = G.30S.), yang membawa korban banyak, baik dari pihak komunis maupun non-komunis. Dengan pecahnya pemberontakan ini maka bergantilah keadaan perjuangan/organisasi buruh Indonesia.

Sesudah G.30 S dapat ditumpas, maka organisasi-organisasi buruh yang non-komunis tetap berdiri dan berkembang. Sedangkan yang pro-komunis, semuanya dibubarkan.

Antara tahun 1965 sampai tahun 1969 belum ada pemunculan organisasi buruh yang istimewa, artinya yang berciri lain daripada organisasi buruh yang sudah ada.

Pemerintah sendiri berusaha dan mendorong agar segera ada satu induk organisasi saja buat seluruh Indonesia. Sebagai langkah permulaan maka pada tahun 1969 Pemerintah mendirikan MPBI (Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia). Inilah rupanya yang meningkat menjadi terbentuknya FBSI sekarang (Federasi Buruh Seluruh Indonesia).

Demikian pandangan selintas kilas mengenai keadaan perjuangan buruh di Indonesia dalam hubungannya dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional.

Selesai.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Dra. Ek. Surastri Karma Trimurti

Di lahirkan tanggal 11 Mei 1912 di Boyolali (Surakarta). Beliau memperoleh gelar sarjananya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sejak 1933 sampai sekarang aktif sebagai wartawan dan penulis.

Pengalaman dalam pergerakan:

1933–	Anggota Partindo
1939–	Anggota Pengurus Besar Gerindo
1941–	Anggota Pengurus Besar Gaspi (Gabungan Sarekat Buruh Partikelir Indonesia).
1943–	Anggota Putera (Pusat Tenaga Rakyat).
1944–	Anggota Jawa Hokokai Honbu.
1945–	Anggota KNIP Pusat.(Komite Nasional Indonesia Pusat).
1946–	Anggota Pengurus Besar Partai Buruh Indonesia.
1947–48	Menteri Perburuhan Republik Indonesia yang pertama di Jogyakarta.
1959–	Anggota Dewan Nasional.
1960–	Anggota Dewan Perancang Nasional.
1962– 1964	Diutus oleh Pemerintah ke negara-negara Eropa.
1966– 1971	Anggota Dewan Nasional Angkatan 45 th 1966 – 1967 s/d 1971.
1969– bubar:	Anggota MPRS.
	Anggota Perintis Kemerdekaan Indonesia.
1969	Anggota Jajasan Tenaga Kerja Indonesia.

Hukuman karena Perjuangan:

1933 dilarang mengajar (onderwijsberbod) untuk waktu yang tidak ditentukan, karena kegiatan politik.
1936 (9 bulan) di Penjara Wanita Bulu Semarang.
1939 (6 bulan) di Penjara Wanita Semarang.
1941/1942 di Internir oleh Belanda ke Ambarawa, Sumowono dan Garut, Jawa Barat.
1942/1943 ditahan oleh Kenpeitai Jepang.

Surat2 penghargaan dari Pemerintah:

"Satya Lantjana Peringatan Perdjoangan Kemerdekaan" th 1961.
"Bintang Mahaputra" th 1961.
"Satyalantjana Perintis Pergerakan Kemerdekaan" th 1965.



Kunjungan ke Berlin tahun 1964, sebagai Anggota Dewan perancang Nasional. (Foto. kol. Ny. Trimurti)



Seminar Tenaga Kerja Wanita di Jakarta tahun 1974 (Foto. kol.Ny. Trimurti)



Ny. Trimurti (tengah) dalam kunjungan kerja sebagai Penasehat Menteri Tenaga Kerja dan Anggota Pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. (Foto. Kol. Ny. Trimurti).



Seminar tentang Intergrasi Wanita dalam pembangunan di Jakarta 1975. (Foto. kol. Ny. Trimurti)

* **Ketahanan Nasional dalam situ**
Asia Tenggara.
oleh Dr.T.B. Simatupang . . . *Rp. 425,–*

* **Kilasan Petikan Sejarah Budi**
oleh Yayasan Idayu . . . . . n. 1.600,–

* **Majalah bulanan, Berita Idayu**

Berisi karangan-karangan yan *bu.*
an dengan Dunia Buku, Penerb *naran,*
Perdagangan Buku, Perpustakaa *likan,*
Berita dan Timbangan Buku (re *nsi)*
dan lain-lain. Ia mirip-mirip maja *an*
"BUKU KITA" dahulu yang pe *ah* *t-*
kan oleh P.T. Gunung Agung d *un-ta*
1955 – 1956 dan banyak mend *ung-*
an, kerjasama dan simpati dari *bit,*
Pengarang, kaum Cendekiawan *ta*
Buku seluruh Indonesia dan di

* **Majalah bulanan, Berita Bibliog** *200,–*
Memuat semua penerbitan In
pelbagai penerbitan Luar N
Bahasa Indonesia. Terbit seka
ngan edisi kumulasi tiap-tiap ta
(Contains all Indonesian publ
various books in Bahasa Indon
in other countries. Issued r
annual cumulative volume).

per **tunggalnya, adalah:**

G **JNG**
molpos 145.
– PU **AT.**

YAYASAN IDAYU

Tujuan

* membantu Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima dalam:
  a. meningkatkan kecerdasan umum bangsa Indonesia
  b. memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.
* membantu Pemerintah Republik Indonesia, dalam bidang pembangunan pada umumnya dan dalam lapangan penyelidikan ilmiah, pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan, pada khususnya.